

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan ekonomi masyarakat secara global adalah kondisi di mana individu dan kelompok masyarakat di seluruh dunia mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi, serta menikmati pemerataan kesempatan dan keadilan sosial dalam sistem ekonomi internasional yang berkelanjutan (Dodds, 2020). Dalam konteks ini, kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama pembangunan yang mencerminkan keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya.

Selanjutnya, secara teoritis kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan. Kesejahteraan menurut Nasikun, dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), (4) jati diri (*identify*) (Hasanah., 2019). Dengan demikian, kesejahteraan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial dan psikologis manusia (Aini et al., 2025).

Sejalan dengan pandangan tersebut, kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar warga, baik secara material maupun nonmaterial, yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari

pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup secara menyeluruh, termasuk akses terhadap layanan publik, keadilan sosial, serta kesempatan untuk berkembang secara individu maupun kolektif. Upaya mencapai kesejahteraan masyarakat memerlukan peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri melalui pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Aini et al., 2025).

Dalam konteks nasional, kesejahteraan dipandang dari kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam konteks modern, kesejahteraan didefinisikan suatu kondisi individu atau masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Fauzi et al., 2022). Dengan kata lain, kesejahteraan yang hakiki mencakup terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani manusia.

Lebih lanjut, kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan kondisi di mana masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material maupun non-material. Salah satu indikator utama kesejahteraan adalah tingkat pendapatan ekonomi masyarakat, karena pendapatan berperan langsung terhadap kemampuan individu atau keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Irwani Jatiningrum (Ekaputra, 2015), peningkatan pendapatan daerah dan kinerja keuangan pemerintah berpengaruh

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi ekonomi yang baik dari tingkat daerah hingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup penduduk secara keseluruhan.

Selain faktor pendapatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Penelitian Irawanto (Irawanto, 2023) di Banjarbaru, menemukan bahwa program pembangunan ekonomi berbasis masyarakat berhasil meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil dan menengah, yang berujung pada peningkatan kesejahteraan. Pendapatan yang meningkat tidak hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga sosial, karena masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan.

Sementara itu, dalam perspektif ekonomi Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Fauzi Arzam (2022), kesejahteraan tidak hanya diukur dari pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga spiritual, sebagaimana prinsip Maqasid Syariah (pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karena itu, pendapatan ekonomi yang adil, halal, dan berkah menjadi fondasi utama bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Tabel 1.1 Indikator Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
Kabupaten Aceh Tengah (2020–2024)

Tahun	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi per Kapita (Rp/Bulan)	Indeks Daya Beli (IDB)	Angka Partisipasi Sekolah (APS, %)	Akses Layanan Kesehatan (%) Penduduk)	Tingkat Kemiskinan (% Penduduk)	Tingkat Pengangguran Terbuka (% Angkatan Kerja)
2020	1.250.000	78,5	86,3	72,4	17,2	6,4
2021	1.380.000	80,1	87,9	75,6	16,5	6,1
2022	1.520.000	82,7	89,1	78,2	15,3	5,8
2023	1.650.000	84,4	90,2	80,7	14,7	5,3
2024	1.780.000	86,8	91,5	83,4	13,8	5,0

Sumber: Data diolah dari *Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh Tengah, Laporan*

Tabel menggambarkan perkembangan indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah selama lima tahun terakhir. Berdasarkan data tersebut, dapat diamati bahwa rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita meningkat signifikan dari Rp1.250.000 per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp1.780.000 per bulan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan daya beli masyarakat dan peningkatan kemampuan ekonomi rumah tangga (Nurhaiza & Fajri, 2020)

Kenaikan indeks daya beli (IDB) dari 78,5 menjadi 86,8 juga memperkuat indikasi bahwa kondisi ekonomi masyarakat semakin membaik. Daya beli yang lebih tinggi memungkinkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan pokok dan meningkatkan standar hidupnya. Dalam aspek pendidikan, angka partisipasi sekolah (APS) juga menunjukkan tren positif, dari 86,3% pada tahun 2020 menjadi 91,5% pada tahun 2024. Hal ini menandakan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta keberhasilan program bantuan pendidikan yang sebagian dibiayai melalui dana zakat dan infak dari Baitul Mal (Ekaputri, 2022)

Dari sisi kesehatan, akses terhadap layanan kesehatan meningkat dari 72,4% menjadi 83,4%, menunjukkan perbaikan fasilitas dan ketersediaan tenaga kesehatan di wilayah pedesaan. Upaya peningkatan kualitas layanan publik ini turut berdampak pada produktivitas masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Selanjutnya, tingkat kemiskinan menurun secara bertahap dari 17,2% pada tahun 2020 menjadi 13,8% pada tahun 2024, sementara tingkat pengangguran terbuka turun dari 6,4% menjadi 5,0% pada periode yang sama. Penurunan ini

mencerminkan keberhasilan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh Tengah (Salsabila & Fajri, 2021)

Dengan demikian, data dalam tabel menunjukkan adanya hubungan positif antara penguatan ekonomi lokal, peran lembaga zakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbaikan indikator konsumsi, pendidikan, kesehatan, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran menegaskan bahwa kesejahteraan ekonomi di Aceh Tengah terus membaik melalui pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis keadilan sosial (Suhendra & Darmawan, 2023b)

Apabila dikaitkan dengan konteks daerah, kesejahteraan ekonomi masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar melalui konsumsi dan daya beli yang stabil. Di Aceh Tengah, yang dikenal sebagai daerah agraris dan penghasil kopi utama di Aceh, kesejahteraan masyarakat masih menghadapi tantangan, terutama di sektor pedesaan. Menurut penelitian, tingkat konsumsi rumah tangga menjadi faktor utama yang mencerminkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, karena peningkatan pengeluaran konsumsi menunjukkan adanya perbaikan ekonomi di tingkat rumah tangga (Nurhaiza & Fajri, 2020).

Selain tingkat konsumsi dan daya beli, akses terhadap pendidikan dan kesehatan merupakan dimensi penting dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh Tengah. Akses pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan pendapatan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi di Aceh, karena pendidikan yang lebih tinggi memberikan peluang kerja yang lebih baik dan memperluas akses terhadap layanan publik seperti Kesehatan (Sembiring et al., 2025). Selain itu, ketersediaan layanan kesehatan di daerah pedesaan seperti Aceh Tengah juga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menekan angka kematian dan meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Namun demikian, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Aceh Tengah juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan masyarakat. Walaupun Aceh secara keseluruhan mengalami penurunan angka kemiskinan beberapa tahun terakhir, beberapa daerah pedalaman seperti Aceh Tengah masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi akibat terbatasnya lapangan kerja non-pertanian. Penelitian di Aceh menunjukkan bahwa peningkatan kesempatan kerja dan penurunan pengangguran memiliki hubungan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Salsabila & Fajri, 2021). Artinya, program pembangunan ekonomi di Aceh Tengah perlu difokuskan pada penciptaan lapangan kerja produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat agar kesejahteraan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh Tengah yaitu hasil dari keterkaitan antara daya beli, konsumsi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta kondisi sosial-ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan melalui kebijakan pembangunan yang terintegrasi, mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan akses layanan publik. Pendekatan yang holistik ini akan mendukung visi pembangunan Aceh Tengah menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadilan sosial (Suhendra & Darmawan, 2023). Kesejahteraan ekonomi Masyarakat, tidak dapat dilepaskan dari sistem distribusi dan pemerataan pendapatan yang adil. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah zakat, yang berperan sebagai mekanisme keuangan sosial Islam dalam mengatasi kemiskinan, meningkatkan daya beli, dan memperkuat solidaritas sosial antaranggota masyarakat.

Secara global, zakat diakui sebagai salah satu pilar keuangan sosial Islam (*Islamic social finance*) yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*), terutama dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*, seperti pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Menurut Ascarya dan Beik (2021), zakat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang mendorong pemerataan ekonomi lintas negara Muslim, serta memperkuat keadilan sosial melalui pemanfaatan dana umat untuk kepentingan produktif dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari

kebijakan publik global dalam ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. dalam konteks global, keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam menghimpun (pengumpulan zakat) secara luas, baik melalui teknologi digital maupun kolaborasi antarnegara. Efektivitas sistem pengumpulan zakat menjadi tolok ukur utama keberhasilan implementasi zakat secara global (Beik & Arsyianti, 2016)

Secara umum, zakat didefinisikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim yang telah memenuhi syarat untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana ditetapkan dalam QS. At-Taubah: 60. Menurut Beik dan Arsyianti (2016), zakat memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi spiritual sebagai ibadah untuk mensucikan harta dan jiwa, serta dimensi sosial ekonomi yang berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Lebih lanjut, menurut Chapra (Chapra, 1992) , zakat merupakan instrumen fiskal Islam yang dapat menggantikan sebagian fungsi pajak dalam sistem ekonomi konvensional, karena selain memiliki kekuatan moral, zakat juga memiliki nilai ekonomi yang nyata dalam menggerakkan kegiatan produktif masyarakat miskin.

Zakat dapat dipahami sebagai alat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diarahkan untuk mengubah kondisi mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) melalui program-program produktif. Firdaus (2020) menjelaskan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, dan penguatan kapasitas usaha mikro mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga mustahik hingga 35% dalam dua tahun.

Dalam konteks daerah seperti Aceh Tengah, zakat yang dikelola oleh lembaga resmi seperti Baitul Mal Aceh Tengah menjadi motor penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat. (Suhendra & Darmawan, 2023) mencatat bahwa keberhasilan Baitul Mal tidak hanya diukur dari besarnya zakat yang disalurkan, tetapi juga dari tingkat transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta efektivitas program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Zakat yang dikelola dengan prinsip keterbukaan, laporan publik yang akuntabel, dan program produktif seperti modal usaha, pelatihan, dan bantuan alat produksi telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan di Aceh Tengah.

Dari sisi pengumpulan zakat, Beik dan Arsyianti (2016) menegaskan bahwa optimalisasi pengumpulan zakat sangat bergantung pada sistem administrasi modern dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Di Aceh Tengah, pengumpulan zakat masih menghadapi kendala dalam hal literasi zakat dan partisipasi muzakki, sehingga potensi zakat yang besar belum sepenuhnya terhimpun. Ascarya dan Beik (2021) merekomendasikan penerapan teknologi digital dan strategi edukasi berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat secara teratur. Dengan pengumpulan yang optimal, potensi dana zakat dapat dimanfaatkan lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

Dalam hal pengelolaan dan distribusi zakat, Hafidhuddin dan Beik (2020) menekankan bahwa prinsip utama dalam pengelolaan zakat adalah amanah, profesionalisme, dan keadilan. Firdaus et al. (2020) menemukan bahwa zakat

produktif yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal, alat usaha, atau pelatihan keterampilan terbukti lebih berkelanjutan dibandingkan zakat konsumtif. Pendekatan zakat produktif inilah yang mulai diterapkan oleh Baitul Mal Aceh Tengah melalui program pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian dan UMKM. Namun, efektivitas distribusi masih perlu diperkuat agar penyaluran zakat benar-benar tepat sasaran dan mampu mengangkat mustahik menjadi muzakki baru.

Kemudian, dari aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, Putra dan Beik (2021) menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik dan audit keuangan berkala menjadi kunci peningkatan kepercayaan masyarakat. Suhendra dan Darmawan (2023) juga menambahkan bahwa di Aceh Tengah, meskipun kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal meningkat, sistem pelaporan dan evaluasi dampak sosial zakat masih perlu ditingkatkan agar akuntabilitas lembaga semakin terjamin. Transparansi yang baik akan menciptakan rasa aman bagi muzakki dan memastikan zakat dikelola sesuai dengan prinsip syariah serta kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, aspek program pemberdayaan ekonomi dari zakat menjadi inti dari dampak sosial zakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Ridlwan (Ridlwan, 2020) menegaskan bahwa zakat produktif dapat mengubah peran mustahik menjadi pelaku usaha mandiri yang berdaya saing. Firdaus et al. (2021) juga membuktikan bahwa penerima zakat produktif mengalami peningkatan pendapatan hingga 40% dalam dua tahun. Di Aceh Tengah, program zakat produktif seperti *Modal Usaha Mikro Mustahik* dan *Program Petani Kopi Gayo* telah dijalankan, namun evaluasi empiris terhadap efektivitasnya masih sangat terbatas. Inilah yang menjadi gap

penelitian, di mana belum banyak studi yang menganalisis secara komprehensif pengaruh pengelolaan zakat terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat daerah.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan menganalisis peran Baitul Mal Aceh Tengah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui efektivitas pengumpulan, pengelolaan, transparansi, dan pemberdayaan zakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan sistem zakat di Aceh sekaligus menjadi acuan kebijakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berbasis syariah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Sejauh mana efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat oleh Baitul Mal Aceh Tengah dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di tingkat daerah, khususnya di Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kontribusi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek pendapatan, daya beli, maupun akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

2. Untuk difokuskan pada evaluasi sistem penghimpunan zakat, mekanisme penyaluran, serta kinerja lembaga dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi zakat sesuai prinsip syariah dan transparansi kelembagaan.
3. Untuk mengungkap hambatan struktural, administratif, maupun sosial yang dihadapi lembaga zakat dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana zakat secara optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi penguatan sistem zakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, baik di Aceh Tengah maupun secara nasional.

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Pengembangan Ilmu Ekonomi Islam

Penelitian ini memperkaya literatur tentang *ekonomi Islam*, khususnya dalam bidang *keuangan sosial Islam (Islamic social finance)* melalui kajian empiris mengenai efektivitas zakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. Kontribusi terhadap Teori Kesejahteraan Ekonomi:

Hasil penelitian dapat memperluas pemahaman mengenai hubungan antara distribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Beik & Arsyianti (2016) dan Chapra (2019).

3. Model Analisis Empiris Baru

Memberikan model konseptual untuk menganalisis hubungan antara pengelolaan zakat, transparansi lembaga, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal yang dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya di daerah lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Daerah

Menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis zakat dan pemberdayaan masyarakat lokal agar lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Bagi Lembaga Zakat (Baitul Mal Aceh Tengah)

Memberikan dasar evaluasi terhadap sistem pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat, termasuk efektivitas program zakat produktif dan transparansi lembaga.

3. Bagi Masyarakat dan Muzakki

Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat serta memperkuat kepercayaan terhadap lembaga zakat melalui transparansi dan akuntabilitas.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Menjadi referensi dalam pengembangan penelitian serupa terkait zakat, keuangan sosial Islam, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat daerah dan nasional.